



RENCANA KERJA

**BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SDM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat izin dan ridho-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 ini dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 -2026.

Melalui penyusunan Renja ini semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good and clean governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Pangkajene Sidenreng, 07 Agustus 2024
**Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kab. Sidenreng Rappang**



HERFAN MAPPAJEPPU, S.IP., M.M.
NIP. 19870502 200701 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 1.1. Latar Belakang..... 1

 1.2. Landasan Hukum 2

 1.3. Maksud dan Tujuan 3

 1.4. Sistematika Penulisan 3

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 6

 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
 Renstra Perangkat Daerah..... 6

 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 19

 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... 20

 2.4. Review Terhadap Rancangan AwalRKPD 22

 2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat 31

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 32

 3.1. Telaahaan terhadap Kebijakan Nasional.....32

 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... 33

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 34

 4.1. Program dan Kegiatan.....34

BAB V PENUTUP 42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Renja OPD merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja OPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja OPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Dokumen Renja OPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan OPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD.

Berdasarkan Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang tahapan, tata cara perencanaan, pengendalian, tata cara Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Proses penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja OPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja OPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja OPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari

pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 – 2026. Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja OPD.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
6. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 78 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang ini,

- a. Sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, tujuan, sasaran, program dan kegiatan, indikator kinerja, dana indikatif serta sumber pendanaan;
- b. Sebagai pedoman bagi pimpinan dan segenap pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menyusun berbagai kebijakan, maupun program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- c. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja ini, adalah:

- a. Pedoman pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih terarah, efektif, dan efisien sesuai dengan perencanaan dan penganggaran;
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dengan memberikan landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara sistematis, berkelanjutan, dan akuntabel serta konsisten dengan dengan program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah;
- c. Sebagai pedoman untuk penilaian kinerja BKPSDM dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi publik.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN,

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/ Kabupaten/ Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnyadikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/ atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indicator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Berisikan Uraian Mengenai

1. Sejauh Mana Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dan Hal Kritis Yang Terkait Dengan Pelayanan Perangkat Daerah,
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian Program Nasional/Internasional, Seperti NSPK, SPM DAN SDGS (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahunyang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD,

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan Mengenai alasan proses tersebut dilakukan
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, Asosiasi–Asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Namun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional,

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas Pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah,

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Berisikan Penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan;
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya;
- d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C. 33

BAB V PENUTUP,

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan,
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang menyelenggarakan Urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan menyelenggarakan 3 program pembangunan. Setiap program selanjutnya disusun dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung. Program dan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka menunaikan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai organisasi perangkat daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, setiap program dan kegiatan dibebani suatu indikator kinerja. Program dibebani indikator kinerja yang bersifat hasil (*outcome*) sedangkan kegiatan dibebani indikator kinerja yang bersifat keluaran (*output*). Target capaian kinerja ditetapkan dalam renstra untuk lima tahun dan dijabarkan dalam target kinerja tahunan dalam renja.

Hasil pengukuran capaian kinerja tiap tahun atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam renja dan renstra disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tabel T-C 29 menyajikan rekapitulasi evaluasi hasilpelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pencapaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang

T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Sidenreng Rappang

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (Tahun 2021 + 2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Tahun berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
5.3	KEPEGAWAIAN									
5.3.2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	328%	306%	716,44%	716,44%	100,00%	327,50%	1350%	4,12
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	16%	15%	9,80%	9,80%	100,00%	15,50%	41%	2,54
5.3.2.201	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pengadaan ASN, ASN yang pensiun/berhenti dan updating Informasi kepegawaian	98%	98,50%	97%	97%	100,00%	97%	292,50%	2,98
5.3.2.201.1	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	3	0	3	3	100,00%	4	7,00	2,33
5.3.2.201.2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1514	0	3	3	100,00%	1377	1380,00	0,91
5.3.2.201.3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	250	237	160	160	100,00%	233	630,00	2,52
5.3.2.201.4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	4	0	0	0		4	4,00	1,00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (Tahun 2021 + 2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Tahun berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
5.3.2.201.5	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	3	0	5	5	100,00%	4	9,00	3,00
5.3.2.201.6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	250	514	314	264	84,08%	233	1011,00	4,04
5.3.2.201.7	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	4	0	0	0	0	4	4,00	1,00
5.3.2.201.8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	3	6	3	3	100,00%	3	12,00	4,00
5.3.2.201.9	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	10	0	5	4	80,00%	10	14,00	1,40
5.3.2.201.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	5000	3807	4483	14643	326,63%	5000	23450,00	4,69
5.3.2.201.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	5000		2000	2000	100,00%	5000	7000,00	1,40
5.3.2.201.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	10	0	0	0	0	10	10,00	1,00
5.3.2.202	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN	100%	80%	90%	90%	100,00%	100%	270,00%	2,70
5.3.2.202.1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	400	1988	480	383	79,79%	400	2771,00	6,93

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (Tahun 2021 + 2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Tahun berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
5.3.2.202.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	860	4169	3018	765	25,35%	800	5734,00	6,67
5.3.2.202.3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	450	808	200	86	43,00%	400	1294,00	2,88
5.3.2.203	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	20%	100%	100%	87%	87,10%	5%	192,10%	9,61
5.3.2.203.1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	500	0	0	0	0	200	200,00	0,40
5.3.2.203.2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	7	4	5	5	100,00%	6	15,00	2,14
5.3.2.203.3	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	5	8	0	0	0	5	13,00	2,60
5.3.2.203.4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	45	30	35	28	80,00%	35	93,00	2,07
5.3.2.203.5	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	5	22	10	10	100,00%	5	37,00	7,40
5.3.2.203.6	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	500	0	30	30	100,00%	200	230,00	0,46
5.3.2.203.7	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	5	0	0	0	0	5	5,00	1,00
5.3.2.203.8	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	500	0	3	3	100,00%	200	203,00	0,41

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (Tahun 2021 + 2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Tahun berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
5.3.2.203.9	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	5	0	0	0	0	5	5,00	1,00
5.3.2.203.10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	500	0	30	30	100,00%	200	230,00	0,46
5.3.2.203.11	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	5	0	0	0	0	5	5,00	1,00
5.3.2.203.12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	5	0	0	0	0	5	5,00	1,00
5.3.2.203.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir (Orang)	800	0	300	89	29,67%	300	389,00	0,49
5.3.2.204	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Cakupan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	95%	90%	100%	100%	99,00%	89%	278,86%	2,94
5.3.2.204.1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	7	0	3	3	100,00%	15	18,00	2,57
5.3.2.204.2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5300	5369	5500	4259	77,44%	5200	14828,00	2,80
5.3.2.204.3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4	0	5	5	100,00%	4	9,00	2,25

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (Tahun 2021 + 2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Tahun berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
5.3.2.204.4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	50	10	10	10	100,00%	50	70,00	1,40
5.3.2.204.5	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	400	3648	300	347	115,67%	400	4395,00	10,99
5.3.2.204.7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	50	1000	1000	700	70,00%	100	1800,00	36,00
5.3.2.204.8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	20	30	25	25	100,00%	30	85,00	4,25
5.3.2.204.9	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	30	60	15	13	86,67%	30	103,00	3,43
5.3.2.204.10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	4	200	100	50	50,00%	4	254,00	63,50
X.XX.1	XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95%	80%	100%	100%	100,00%	85%	265,00%	2,79
X.XX.1.201	XXX Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	300,00%	3,00
X.XX.1.201.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	10	0	10	10	100,00%	10	20,00	2,00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (Tahun 2021 + 2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Tahun berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
X.XX.1.201.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10	0	10	10	100,00%	10	20,00	2,00
X.XX.1.201.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10	0	10	10	100,00%	10	20,00	2,00
X.XX.1.201.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10	0	10	10	100,00%	10	20,00	2,00
X.XX.1.201.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	6	6	6	100,00%	6	18,00	3,00
X.XX.1.202	XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95%	92%	95%	100,00%	105,26%	95%	287,00%	3,02
X.XX.1.202.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38	37	37	37	100,00%	38	112,00	2,95
X.XX.1.202.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20	20	20	20	100,00%	20	60,00	3,00
X.XX.1.202.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10	0	10	10	100,00%	10	20,00	2,00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (Tahun 2021 + 2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Tahun berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
X.XX.1.202.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20	0	20	20	100,00%	20	40,00	2,00
X.XX.1.206	XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	95%	90%	95%	95%	100,00%	95%	280,00%	2,95
X.XX.1.206.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	136	150	150	100,00%	100	386,00	3,86
X.XX.1.207	XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	300,00%	3,00
X.XX.1.207.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	0	0	0	0	5	5,00	1,00
X.XX.1.207.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	0	0	0	0	8	8,00	1,60
X.XX.1.208	XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97%	95%	95%	100%	105,26%	95%	290,00%	2,99
X.XX.1.208.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500	600	650	650	100,00%	500	1750,00	3,50
X.XX.1.208.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	12	100,00%	12	36,00	3,00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (Tahun 2021 + 2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Tahun berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
X.XX.1.208.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	100,00%	12	36,00	3,00
X.XX.1.209	XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	300,00%	3,00
X.XX.1.209.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15	30	15	15	100,00%	15	60,00	4,00
X.XX.1.209.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	14	7	7	100,00%	15	36,00	2,40
X.XX.1.209.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	6	1	1	100,00%	1	8,00	8,00
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
5.4.2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	19,57%	18,37%	66,22%	29,57%	44,65%	18,57%	66,51%	3,40
5.4.2.201	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Teknis/Fungsional	20%	4,50%	5%	6,39%	127,80%	5%	15,89%	0,79

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (Tahun 2021 + 2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Tahun berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
5.4.2.201.1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	5	0	0	0	0	5	5,00	1,00
5.4.2.201.2	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	5	0	0	0	0	5	5,00	1,00
5.4.2.201.3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	500	0	0	0	0	200	200,00	0,40

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (Tahun 2021 + 2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Tahun berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
5.4.2.201.4	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	5	35	35	35	100,00%	5	75,00	15,00
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti pendidikan dan Pelatihan Struktural	18%	53,60%	54%		0,00%	18%	71,60%	3,98
5.4.2.202.1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional yang Disusun	5	0	0	0	0	5	5,00	1,00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (Tahun 2021 + 2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Tahun berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
5.4.2.202.2	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang Terkelola dengan Baik	1	0	0	0	0	1	1,00	1,00
5.4.2.202.3	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	500	0	0	0	0	200	200,00	0,40
5.4.2.202.4	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	5	0	0	0	0	5	5,00	1,00
5.4.2.202.5	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	5	0	0	0	0	5	5,00	1,00
5.4.2.202.6	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	5	0	0	0	0	5	5,00	1,00
5.4.2.202.7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	10	97	200	18	9,00%	5	120,00	12,00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (Tahun 2021 + 2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Tahun berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
5.4.2.202.8	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	5	0	0	0	0	5	5,00	1,00

Sumber: LKjIP BKPSDM Tahun 2023

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan SPM untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar dan IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan digunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) meliputi aspek tingkat capaian kinerja serta menetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang.

Secara umum dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang telah dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Keberhasilan ini terlihat dari capaian indikator sasaran yang mencapai bahkan melampaui target yang diharapkan. Adapun rincian penjelasan tercantum dalam Tabel dibawah ini:

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai Rata-rata SKP ASN			88,5	88,50	88,60	88,70	88,50	-	88,60	88,70	
2	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai seluruh OPD			65	65	67	70	95,52	95,52	67	70	
3	Persentase Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			18,37	18,57	18,97	19,57	27,05	27,05	18,97	19,57	

Sumber: LKj-IP BKPSDM Tahun 2023

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia

a. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai OPD teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien.

Tabel 2.3.1
Capaian Kinerja Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dibidang Kepegawaian	105.16%	Sangat Baik
2	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Daerah	119,41%	Sangat Baik
3	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	103,67%	Sangat Baik
HASIL PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)		109,41%	Sangat Baik

Sumber: LKJ-IP BKPSDM Tahun 2023

Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang secara keseluruhan tercapai 109,41%, maka dapat dikatakan bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan Sangat Baik, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang berusaha memaksimalkan pencapaian target yang telah ditetapkan di tahun 2023.

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

- 1) Masih Kurangnya ASN yang menduduki Jabatan Fungsional (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan), berdasarkan data terakhir per 31 Desember 2023 sebanyak 329 orang.
- 2) Masih adanya pegawai yang berpendidikan SMA kebawah, berdasarkan data terakhir per 31 Desember jumlah ASN yang berpendidikan SMA kebawah sebanyak 505orang data ini akan mengalami penurunan setiap tahunnya karna adanya program penyesuaian ijazah yang dilaksanakan BKPSDM Kabupaten Sidenreng Rappang.
- 3) Masih adanya pegawai fungsional selain guru dan tenaga kesehatan belum bersertifikat, data per 31 Desember 2023 jumlah ASN yang bersertifikat sebanyak 60 orang dari 332 orang, jadi jumlah jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan rasionya sebesar 18,07%, angka ini menunjukkan jumlah jabatan

fungsional belum bersertifikat masih banyak dan diharapkan tahun berikutnya bisa lebih banyak.

- 4) Masih rendahnya ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal, yang dimaksud disini adalah pendidikan SMA ke S1, S1 ke S2, mekanisme keikutsertaan pendidikan dan pelatihan formal melalui Tugas Belajar diharapkan mampu menjadi wadah bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi ASN itu sendiri. Tahun 2023 jumlah ASN yang mendapatkan Tugas Belajar sebanyak 144 orang.
- 5) Pelaksanaan diklat struktural belum mencapai target yang telah ditetapkan disebabkan keterbatasan alokasi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan, permasalahan ini merupakan masalah klasik dari tahun ke tahun sehingga menyebabkan banyaknya pejabat belum mengikuti diklat struktural. Data sampai dengan 31 Desember 2023 yaitu 7,63%, hal yang menyebabkan kurangnya persentase ini adalah pejabat sudah pensiun dan pengangkatan pejabat baru serta naiknya eselon pejabat.

c. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program

Dari permasalahan dan hambatan yang ada, tentunya dampak terhadap visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang di dalam RPD 2024-2026 satu diantaranya yaitu keterlambatan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025. Disamping itu, pengembangan kompetensi SDM Aparatur BKPSDM yang belum optimal, perlu ditingkatkan lagi agar dapat mencapai target NSPK.

d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

- Tantangan

1. Situasi kondisi politik nasional dan lokal (dalam komitmen pengembangan SDM Aparatur);
2. Komitmen pengembangan dan peningkatan kualitas SDM berupa anggaran belum sesuai (dibawah standar) dengan keketentuan, diindikasikan dengan terbatasnya kuantitas pengiriman dan penyelenggaraan Diklat Teknis / Fungsional;
3. Adanya Peraturan Perundang-undangan yang kurang mendukung terhadap pelaksanaan Diklat di Daerah;
4. Belum pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur;
5. Semakin kritisnya pola pikir masyarakat;
6. Pengelolaan Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur di daerah lain;
7. Globalisasi (transparansi, akuntabel pengelolaan SDM).

- Peluang

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS: Mengatur tentang pengelolaan dan penataan PNS, termasuk perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan kompetensi, dan sistem merit;
2. Keputusan Kepala BKN No 46 A tentang Standar kompetensi Jabatan Struktural dan No 46 B tentang Evaluasi Jabatan;
3. Tuntutan tentang Standar pelayanan minimal (SPM) dalam Pelayanan Kepegawaian;

4. Kebijakan kepegawaian secara nasional yang mensyaratkan diklat sebagai bagian sistem pembinaan pegawai;
 5. Banyaknya lembaga pendidikan dan pelatihan lokal maupun nasional yang bisa diajak kerjasama diindikasikan dengan Kerjasama penyelenggaraan Diklat dengan sistem pola kemitraan;
 6. Kerjasama dalam proses pelayanan kepegawaian (pensiun, askes, dll);
 7. Banyaknya tawaran peningkatan SDM (diklat fungsional, beasiswa, pendidikan formal);
 8. Makin banyaknya lembaga pengawasan formal dan non formal.
- e. Formulasi Isu-isu penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan**

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang di masa mendatang antara lain yaitu:

- 1) Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) agar terintegrasi dengan aplikasi lain
- 2) Peningkatan Kualitas Pelayanan dibidang Kepegawaian yang cepat dan tepat waktu.
- 3) Peningkatan Kedisiplinan Aparatur dengan Kegiatan Program Peningkatan disiplin Aparatur dengan Melalui SIDAK yang lebih rutin.
- 4) Pemenuhan saran dan prasarana aparatur dalam rangka membantu peningkatan kinerja Instansi.
- 5) Mengkoordinasikan dengan Tim TAPD terkait pengembangan kompetensi ASN baik itu diklat teknis/fungsional dan diklat struktural agar dipersiapkan penganggarannya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RPD merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana kerja. Bagian ini berisi perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas terhadap rumusan program dan kegiatan yang sesuai dengan rancangan awal SKPD termasuk dalam hal penganggaran. Tahapan Rancangan Awal SKPD disajikan dalam Tabel T-C.31

Tabel T-C.31.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Rancangan Awal RKPD (Berdasarkan di Renstra PD Tahun 2025)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KEPEGAWAIAN				7.208.169.158	KEPEGAWAIAN				9.310.704.050	
1	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	327,7%	53.025.000	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	328%	1.044.932.350	
			Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	15,7%				Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	16%		
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Persentase Pengadaan ASN, ASN yang Pensiun/berhenti dan updating Informasi Kepegawaian	97%	17.675.000	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Persentase Pengadaan ASN, ASN yang Pensiun/berhenti dan updating Informasi Kepegawaian	97,5%	337.650.750	
1	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	3 Dokumen	1.515.000	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	3 Dokumen	1.530.150	
2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1448 Dokumen	1.515.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1514 Dokumen	1.530.150	
3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jakarta, Makassar, Sidrap	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	239 Dokumen	2.020.000	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jakarta, Makassar, Sidrap	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	250 Dokumen	300.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD (Berdasarkan di Renstra PD Tahun 2025)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jakarta, Makassar, Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	3 Dokumen	1.515.000	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jakarta, Makassar, Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	3 Dokumen	1.530.150	
5	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Sidrap, Makassar	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	239 Dokumen	2.020.000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Sidrap, Makassar	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	250 Dokumen	14.000.000	
6	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Sidrap, Makassar	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	3 Lembaga	1.515.000	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Sidrap, Makassar	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	3 Lembaga	1.530.150	
7	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Sidrap, Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	10 Dokumen	1.515.000	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Sidrap, Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	10 Dokumen	1.530.150	
8	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Sidrap, Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	5000 Dokumen	4.545.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Sidrap, Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	5000 Dokumen	10.000.000	
9	Pengelolaan Data Kepegawaian	Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	5000 Dokumen	1.515.000	Pengelolaan Data Kepegawaian	Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	5000 Dokumen	6.000.000	
2	Mutasi dan Promosi ASN		Persentase pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN	100%	13.635.000	Mutasi dan Promosi ASN		Persentase pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN	100%	90.000.000	
10	Pengelolaan Mutasi ASN	Makassar, Jakarta, Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	400 Dokumen	2.525.000	Pengelolaan Mutasi ASN	Makassar, Jakarta, Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	400 Dokumen	30.000.000	
11	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Sidrap, Makassar	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	850 Dokumen	10.100.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Sidrap, Makassar	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	860 Dokumen	40.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD (Berdasarkan di Renstra PD Tahun 2025)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Pengelolaan Promosi ASN	Makassar, Jakarta, Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	350 Dokumen	1.010.000	Pengelolaan Promosi ASN	Makassar, Jakarta, Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	450 Dokumen	20.000.000	
3	Pengembangan Kompetensi ASN		Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	10%	1.515.000	Pengembangan Kompetensi ASN		Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	20%	560.000.000	
13	Pengelolaan Assessment Center	Sidrap	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	4 Dokumen	202.000	Pengelolaan Assessment Center	Sidrap	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	7 Dokumen	500.000.000	
14	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Sidrap, Makassar	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	40 Orang	1.010.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Sidrap, Makassar	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	45 Orang	10.000.000	
15	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Makassar, Jakarta, Sidrap	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	300 Orang	303.000	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Makassar, Jakarta, Sidrap	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	500 Orang	50.000.000	
4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Cakupan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	94%	20.200.000	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Cakupan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	95%	57.281.600	
16	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Sidrap, Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	10 Dokumen	1.010.000	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Sidrap, Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	7 Dokumen	3.050.000	
17	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5100 Dokumen	3.030.000	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5300 Dokumen	8.700.000	
18	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4 Laporan	4.545.000	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4 Laporan	5.814.000	
19	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Sidrap	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	50 Orang	505.000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Sidrap	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	50 Orang	5.410.000	
20	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Sidrap, Makassar	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	400 Orang	2.020.000	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Sidrap, Makassar	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	400 Orang	4.287.000	

No	Rancangan Awal RKPD (Berdasarkan di Renstra PD Tahun 2025)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Pembinaan Disiplin ASN	Sidrap, Makassar	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	70 Orang	2.020.000	Pembinaan Disiplin ASN	Sidrap, Makassar	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	50 Orang	16.800.000	
22	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Sidrap	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	25 Laporan	6.060.000	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Sidrap	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	20 Laporan	6.120.600	
23	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Sidrap	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	30 Dokumen	505.000	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Sidrap	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	30 Dokumen	4.000.000	
24	Evaluasi Disiplin ASN	Sidrap, Makassar	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	4 Laporan	505.000	Evaluasi Disiplin ASN	Sidrap, Makassar	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	4 Laporan	3.100.000	
2	XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90%	7.054.144.158	XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90%	5.414.600.000	
5	XXX Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	6.100.000	XXX Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	6.100.000	
25	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Sidrap	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Sidrap	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen	1.000.000	
26	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sidrap	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sidrap	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10 Dokumen	1.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD (Berdasarkan di Renstra PD Tahun 2025)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Sidrap	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen	1.200.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Sidrap	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen	1.200.000	
28	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Sidrap	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10 Dokumen	1.300.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Sidrap	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10 Dokumen	1.300.000	
29	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sidrap	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	1.600.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sidrap	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	1.600.000	
6	XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan Layanan Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah	95%	6.845.544.158	XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan Layanan Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah	95%	4.108.700.000	
30	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sidrap	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	6.841.644.158	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sidrap	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	4.104.800.000	
31	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sidrap	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20 Dokumen	1.500.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sidrap	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20 Dokumen	1.500.000	
32	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sidrap	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	1.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sidrap	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	1.200.000	

No	Rancangan Awal RKPD (Berdasarkan di Renstra PD Tahun 2025)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Sidrap	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	20 Laporan	1.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Sidrap	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	20 Laporan	1.200.000	
7	XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	95%	10.000.000	XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,95	500.000.000	
34	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sidrap, Makassar, Jakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	10.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sidrap, Makassar, Jakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	500.000.000	
8	XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	1.000.000	XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah	1	324.500.000	
35	Pengadaan Mebel	Sidrap	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	35 Unit	-	Pengadaan Mebel	Sidrap	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	35 Unit	250.000.000	
36	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sidrap	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	1.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sidrap	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	74.500.000	
9	XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97%	113.500.000	XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,97	188.000.000	
37	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sidrap	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	1.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sidrap	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	3.000.000	
38	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sidrap	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	80.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sidrap	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	100.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD (Berdasarkan di Renstra PD Tahun 2025)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sidrap	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	32.500.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sidrap	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	85.000.000	
10	XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	78.000.000	XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	287.300.000	
40	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sidrap	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	75.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sidrap	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	250.300.000	
41	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sidrap	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	1.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sidrap	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	17.000.000	
42	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sidrap	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sidrap	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.000.000	
2	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				101.000.000	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				2.851.171.700	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	18,97%	101.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	19,57%	2.851.171.700	
11	Pengembangan Kompetensi Teknis		Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Teknis/Fungsional	10%	83.830.000	Pengembangan Kompetensi Teknis		Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Teknis/Fungsional	20%	83.830.000	

No	Rancangan Awal RKPD (Berdasarkan di Renstra PD Tahun 2025)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	SIDRAP MAKASSAR JAKARTA	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	300 Orang	83.830.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	SIDRAP MAKASSAR JAKARTA	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	500 Orang	83.830.000	
12	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti pendidikan dan Pelatihan Struktural	18%	17.170.000	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti pendidikan dan Pelatihan Struktural	18%	2.767.341.700	
43	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	SIDRAP	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	10 Laporan	17.170.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	SIDRAP	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	10 Laporan	2.767.341.700	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjangkaran aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap kegiatan pembangunan yang direncanakan, sebagai representasi kebutuhan Masyarakat.

Mengingat bahwa BKPSDM Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan perangkat daerah yang mengurus Pelayanan Kepegawaian/ASN menjalankan fungsi urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kepegawaian dan Pengembangan SDM, maka tidak mengampu kegiatan yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Sidenreng Rappang
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Nama Perangkat Daerah: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1.	NIHIL				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahaan terhadap Kebijakan Nasional

Dokumen perencanaan pembangunan nasional dalam bidang aparatur disusun dalam rangka membangun birokrasi yang berdaya saing global. Daya saing tersebut berfokus pada peningkatan kualitas ASN khususnya pada peningkatan kompetensi ASN dan manajemen ASN berbasis sistem merit. ASN sebagai motor penyelenggara roda pemerintahan, pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan dibutuhkan kompetensi yang sesuai. Salah satu upaya peningkatankompetensi dimaksud adalah dengan pengembangan sumber daya ASN melalui Pendidikan dan pelatihan.

Selain itu, pengembangan kompetensi ASN juga merupakan bagian penting dalam reformasi birokrasi yang berperan pada pembangunan bangsa secara berkesinambungan. Upaya pengembangan kompetensi ASN sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah mewajibkan seluruh ASN mengikuti pengembangan kompetensi minimum 20 jam pelajaran per tahun. Hal ini berarti setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi ASN yang bersangkutan.

Dalam 5 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional, agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas, yang menjadi acuan BKPSDM Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu “Peningkatan Kualitas ASN ”

Dalam mendukung kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Kab. Sidrap, dalam hal ini BKPSDM Kab. Sidrap menyusun rencana kerja dengan berbagai sasaran kerja yang selaras dan kontributif terhadap kebijakan nasional, terutama kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara selaku pelaksana kebijakan publik agar menjadi lebih professional.

Tabel 3.1
Kebijakan Nasional (RPJMN 2025-2029) dan Rencana Kerja
BKPSDM Kab. Sidrap Tahun 2025

No.	Kebijakan Nasional (RPJMN Tahun 2020-2024)	Rencana Kerja BKPSDM Kab. Sidrap Tahun 2024
1.	SDM Berkualitas melalui peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa.	Penerapan pelayanan kepegawaian yang transparan, cepat dan tepat
		Mengoptimalkan seluruh sumber dayadan teknologi informasi dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan sistem perencanaan, pengembangan dan pembinaan kinerja yang jelas dan terukur
		Melakukan Reviuw Secara Internal dan Penajaman Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan bersifat lebih konkrit dari pada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa yang akan datang. Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistik berdasarkan atas visi dan misi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Sidrap dan strategi yang diletakkan untuk mencapai tujuan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran
Badan Kepegawaian Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sidenreng Rappang

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL TAHUN (BASELINE) 2022	TARGET TAHUN 2023	TARGET TAHUN RENSTRA		
							TAHUN KE-1 (2024)	TAHUN KE-2 (2025)	TAHUN KE-3 (2026)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Daerah dan Prima dalam Pelayanan	Indeks Profesionalitas ASN			83	85	84		86
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan di bidang Kepegawaian	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang terselesaikan	90	95	92	94	95
			Meningkatnya Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5,00	6,39	6	7	8
			Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai Sakip	63,52 (B)	64 (B)	64 (B)	65 (B)	66

Sumber: Renstra BKPSDM Kab. Sidrap tahun 2024-2026

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja merupakan suatu hal penting bagi terselenggaranya suatu kegiatan. Kedudukan perencanaan kinerja merupakan isu strategis yang harus diperhatikan dan dipecahkan oleh pimpinan instansi yang akan mengarahkan instansinya kepada pelaksanaan misi dan pencapaian misi organisasi. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Sebagai bagian dari manajemen kinerja yang baik, perencanaan kinerja memerlukan pemikiran yang keras untuk menyelaraskan berbagai hal yang telah dituangkan dalam rencana strategis dan kemungkinan pelaksanaannya.

Rencana Kerja yang baik haruslah selaras dan terintegrasi dengan penataan program dalam organisasi dan perencanaan kegiatan di tingkat pelaksana. Berikut disampaikan Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Sidrap tahun anggaran 2025 pada tabel berikut ini :

Tabel T-C 33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Sidenreng Rappang

Nama Perangkat Daerah: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

lembar.....dari.....

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.3	KEPEGAWAIAN				4.811.586.490	APBD			7.211.017.258
5.3.2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio Pegawai PendidikanTinggidan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		327,7%	299.485.000	APBD		328%	53.555.250
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		15,7%		APBD		16%	
5.3.2.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pengadaan ASN, ASN yang Pensiun/ berhenti dan updating Informasi Kepegawaian		97%	74.640.000	APBD		97,5%	17.851.750
5.3.2.2.01.1	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Sidrap	3 Dokumen	2.515.000	APBD		3 Dokumen	1.530.150
5.3.2.2.01.2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Sidrap	1448 Dokumen	3.500.000	APBD		1514 Dokumen	1.530.150
5.3.2.2.01.3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jakarta, Makassar, Sidrap	239 Dokumen	42.000.000	APBD		250 Dokumen	2.040.200
5.3.2.2.01.5	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jakarta, Makassar, Sidrap	3 Dokumen	1.515.000	APBD		3 Dokumen	1.530.150
5.3.2.2.01.6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Sidrap, Makassar	239 Dokumen	4.020.000	APBD		250 Dokumen	2.040.200

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.3.2.2.01.8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Sidrap, Makassar	3 Lembaga	3.515.000	APBD		3 Lembaga	1.530.150
5.3.2.2.01.9	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Sidrap, Makassar	10 Dokumen	2.515.000	APBD		10 Dokumen	1.530.150
5.3.2.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Sidrap, Makassar	5000 Dokumen	10.545.000	APBD		5000 Dokumen	4.590.450
5.3.2.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Sidrap	5000 Dokumen	4.515.000	APBD		5000 Dokumen	1.530.150
5.3.2.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN		100%	21.635.000	APBD		100%	13.771.350
5.3.2.2.02.1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Makassar, Jakarta, Sidrap	400 Dokumen	7.525.000	APBD		400 Dokumen	2.550.250
5.3.2.2.02.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Sidrap, Makassar	850 Dokumen	10.100.000			860 Dokumen	10.201.000
5.3.2.2.02.3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Makassar, Jakarta, Sidrap	350 Dokumen	4.010.000	APBD		450 Dokumen	1.020.100
5.3.2.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN		10%	152.010.000	APBD		20%	1.530.150
5.3.2.2.03.2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Sidrap	4 Dokumen	100.000.000	APBD		7 Dokumen	204.020

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.3.2.203.4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Sidrap, Makassar	40 Orang	2.010.000			45 Orang	1.020.100
5.3.2.203.10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	Makassar, Jakarta, Sidrap	300 Orang	50.000.000			500 Orang	306.030
5.3.2.204	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Cakupan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		94%	51.200.000			95%	20.402.000
5.3.2.204.1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Sidrap, Makassar	10 Dokumen	3.010.000			7 Dokumen	1.020.100
5.3.2.204.2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Sidrap	5100 Dokumen	8.030.000			5300 Dokumen	3.060.300
5.3.2.204.3	EvaluasiHasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Sidrap	4 Laporan	5.545.000			4 Laporan	4.590.450
5.3.2.204.4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Sidrap	50 Orang	5.505.000	APBD		50 Orang	510.050
5.3.2.204.5	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Sidrap, Makassar	400 Orang	2.020.000	APBD		400 Orang	2.040.200
5.3.2.204.7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Sidrap, Makassar	70 Orang	3.020.000	APBD		50 Orang	2.040.200
5.3.2.204.8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Sidrap	25 Laporan	16.060.000	APBD		20 Laporan	6.120.600
5.3.2.204.9	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Sidrap	30 Dokumen	4.505.000	APBD		30 Dokumen	510.050

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.3.2.204.10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Sidrap, Makassar	4 Laporan	3.505.000	APBD		4 Laporan	510.050
X.XX.1	XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		90%	3.678.271.490	APBD		90%	7.056.290.308
X.XX.1.201	XXX Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	8.100.000	APBD		100%	6.222.610
X.XX.1.201.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sidrap	10 Dokumen	2.000.000	APBD		10 Dokumen	1.020.100
X.XX.1.201.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sidrap	10 Dokumen	2.000.000	APBD		10 Dokumen	1.020.100
X.XX.1.201.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Sidrap	10 Dokumen	1.200.000	APBD		10 Dokumen	1.224.120
X.XX.1.201.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Sidrap	10 Dokumen	1.300.000	APBD		10 Dokumen	1.326.130
X.XX.1.201.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sidrap	6 Laporan	1.600.000	APBD		6 Laporan	1.632.160

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X.XX.1.202	XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		95%	3.228.486.490	APBD		95%	6.843.497.548
X.XX.1.202.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sidrap	38 Orang/bulan	3.214.586.490	APBD		38 Orang/bulan	6.839.519.158
X.XX.1.202.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sidrap	20 Dokumen	8.500.000	APBD		20 Dokumen	1.530.150
X.XX.1.202.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sidrap	10 Laporan	3.200.000	APBD		10 Laporan	1.224.120
X.XX.1.202.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Sidrap	20 Laporan	2.200.000	APBD		20 Laporan	1.224.120
X.XX.1.206	XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		95%	116.410.000	APBD		0,95	10.201.000
X.XX.1.206.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sidrap, Makassar, Jakarta	100 Laporan	116.410.000	APBD		100 Laporan	10.201.000
X.XX.1.207	XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah		100%	15.000.000	APBD		1	1.020.100
X.XX.1.207.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sidrap	7 Unit	15.000.000	APBD		5 Unit	1.020.100

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X.XX.1.208	XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		97%	201.275.000	APBD		0,97	115.781.250
X.XX.1.208.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sidrap	500 Laporan	6.000.000	APBD		500 Laporan	1.020.000
X.XX.1.208.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sidrap	12 Laporan	80.000.000	APBD		12 Laporan	81.608.000
X.XX.1.208.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sidrap	12 Laporan	115.275.000	APBD		12 Laporan	33.153.250
X.XX.1.209	XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100%	109.000.000	APBD		1	79.567.800
X.XX.1.209.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sidrap	15 Unit	82.000.000	APBD		15 Unit	76.507.500
X.XX.1.209.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sidrap	15 Unit	7.000.000	APBD		15 Unit	1.020.100
X.XX.1.209.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sidrap	1 Unit	20.000.000	APBD		1 Unit	2.040.200
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				833.830.000	APBD			101.171.700
5.4.2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		18,97%	833.830.000	APBD		19,57%	101.171.700

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.4.2.201	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Teknis/ Fungsional		10%	83.830.000	APBD		20%	83.830.000
5.4.2.201.3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Sidrap Makassar Jakarta	300 Orang	83.830.000	APBD		500 Orang	83.830.000
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti pendidikan dan Pelatihan Struktural		18%	750.000.000	APBD		18%	17.341.700
5.4.2.202.7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Sidrap	10 Laporan	750.000.000	APBD		10 Laporan	17.341.700

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) tahun 2025 disusun oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang adalah rencana tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berjangka 5 (lima) tahun. Rencana kerja ini memberikan gambaran mengenai program, kegiatan, sasaran, indikator-indikator kinerja dan target yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran sehingga pada akhir tahun anggaran pelaksanaannya dapat diukur.

Penyusunan Rencana Kerja ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang selama Tahun Anggaran 2025 dan sebagai pengukur capaian kinerja organisasi dalam tahun kedepan.

a. Catatan Penting

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 yaitu:

1. Sesuai dengan amanah Undang-Undang ASN dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, setiap pegawai berhak mendapatkan pengembangan kompetensi minimal 20 jam pelajaran per tahun, terkait dengan hal tersebut perlu penambahan alokasi kompetensi aparatur anggaran untuk pengembangan kompetensi aparatur.
2. Terdapat usulan Diklat Teknis dari Inspektorat yang belum terakomodasi yaitu Diklat Teknis Evaluasi SAKIP.
3. Terdapat beberapa kegiatan BKPSDM yang sangat tergantung oleh kebijakan dari pusat seperti Pengadaan Pegawai, penetapan NIP sehingga dimungkinkan ada perubahan kebijakan di luar masa perencanaan.
4. Untuk menerapkan sistem merit di Kabupaten Sidenreng Rappang, banyak hal yang perlu dilakukan yaitu optimalisasi pengembangan karier pegawai yang dimulai dengan pemetaan talenta, analisis kesenjangan kompetensi dan kesenjangan kinerja, dan pembentukan talent pool dan rencana suksesi serta perlunya penerapan manajemen kinerja.

b. Kaidah Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2025, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2023
2. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya
3. Tujuan yang dikehendaki
4. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya

5. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.
6. Dokumen Renja sebagai salah satu dasar penyusunan RKA Perangkat Daerah dengan memperhatikan ketersediaan Anggaran yang ada

c. Rencana Tindak lanjut

Langkah-langkah yang ditempuh dalam upaya pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerjanya antara lain sebagai berikut:

1. Perlunya dukungan anggaran untuk penerapan sistem merit dan pengembangan kompetensi aparatur
2. Mengoptimalkan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan BKPSDM.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 semoga dapat dijadikan pedoman untuk lebih memacu dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun-tahun mendatang serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua

Pangkajene Sidenreng, 07 Agustus 2024

**Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia**



HERFAN MAPPAJEPPU, S.IP., M.M.
N LP. 19870502 200701 1 001